



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2020



Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2020



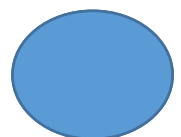


Silat

Penyusun:

Penanggung Jawab: Ludiro; Ketua Tim: Windraty
Ariane Siallagan; Anggota: Sri Winarno; Wulandari;
Idha Laeli; Welly Wardhani; Magdalena; Yulia Tetra;
Abdul Ghani; Nuryani

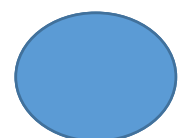
KANWIL DJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi DKI Jakarta





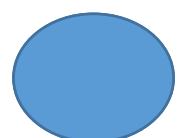
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	3
.....	
C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN.....	6
A. Pendapatan Negara.....	7
B. Belanja Negara.....	9
C. Prognosis Realisasi APBN.....	1 1
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....	1 2
A. Pendapatan Daerah.....	1 3
B. Belanja Daerah.....	1 5
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019.....	1 6





IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD).....	1
APBD).....	8
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	1
B. Pendapatan Konsolidasian.....	8
C. Belanja Konsolidasian.....	1
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto.....	9
	2
	0
	2
	2
V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	2
TERPILIH.....	3
- Dampak COVID-19 terhadap Ekonomi dan Keuangan DKI Jakarta	2
	3
DAFTAR PUSTAKA.....	





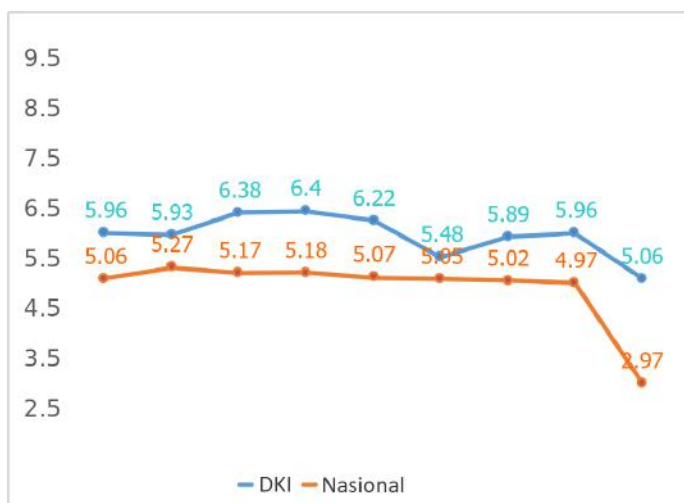
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dinamika dan kondisi perekonomian regional banyak dipengaruhi oleh pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang telah menyebar di hampir 213 negara termasuk Indonesia. Jakarta telah menjadi episentrum penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai hampir 50% kasus

positif di Indonesia yang menyebar hampir merata seantero Jakarta (Pemprov DKI Jakarta, 2020).

Grafik 1.1
Laju Pertumbuhan Triwulanan yoy (dalam%)

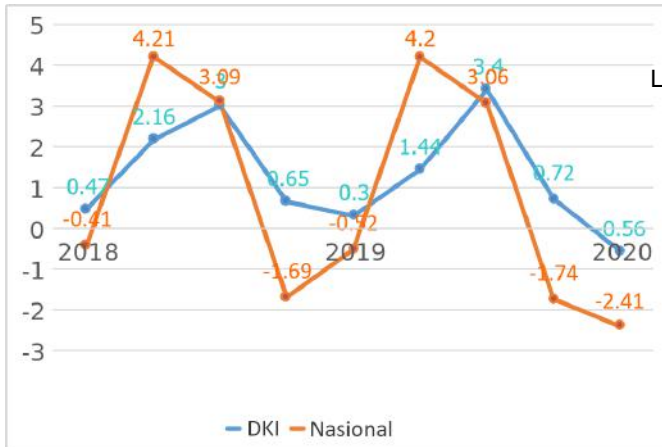


Sejalan dengan hal tersebut, dinamika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta triwulan I banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, PDRB menurut harga berlaku sebesar Rp731.786,5 miliar dan menurut harga konstan sebesar Rp468.814,2 miliar.

Laju Pertumbuhan triwulan I 2020 *year on year* (yoy) tercapai 5,06%, jauh melambat bila dibandingkan triwulan I 2019. Pembatasan aktivitas ekonomi dan upaya pencegahan COVID-19 adalah dua hal yang saling menegaskan. Pembatasan bahkan penghentian sebagian besar aktivitas ekonomi akan mempercepat berakhirnya wabah COVID-19. Sebaliknya, dari perspektif ekonomi, penurunan signifikan aktivitas ekonomi berdampak pada menurunnya PDRB.

Sumber: Website BPS Provinsi DKI Jakarta dan BPS RI 2018-2020





Grafik 1.2
Laju Pertumbuhan Triwulanan q-to-q (dalam %)

Secara *quarter to quarter* (q-to-q) laju pertumbuhan Jakarta triwulan I 2020 sebesar -0.56% jauh melambat juga bila dibandingkan triwulan IV 2019 dan utamanya disebabkan oleh penurunan konsumsi dan investasi akibat pembatasan aktivitas ekonomi

Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19.

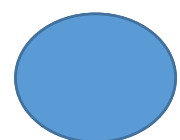
Sumber: Website BPS Provinsi DKI Jakarta dan BPS RI 2018-2020

1. Pertumbuhan Ekonomi dari sisi Lapangan Usaha

Perlambatan dari sisi lapangan usaha disebabkan oleh kontraksi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar -1,47%. Penyebabnya adalah penurunan seluruh subsektor dan yang terdalam pada subsektor industri alat angkut, mesin dan peralatannya, yang diduga sebagai dampak penurunan permintaan dari pasar domestik paska Natal dan libur akhir tahun (ekonomibisnis.com, 2020). Lapangan usaha berikutnya yang mengalami kontraksi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang terkontraksi -7,22%. Penurunan harga minyak dunia serta curah hujan yang tinggi diperkirakan masih membatasi operasi sektor pertambangan dan penggalian (ekonomibisnis.com, 2020).

Pada triwulan ini lapangan usaha jasa keuangan tumbuh paling tinggi 15,84%, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Februari 2020 lalu telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus perekonomian di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (pasardana.id, 2020). Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi yaitu jasa kesehatan dan sosial yang tumbuh 10,13% serta informasi dan komunikasi yang tumbuh 9,16%. Ditengah merebaknya pandemi COVID-19 disaat lapangan usaha lain mengalami penurunan, tiga lapangan usaha ini justru mendapat keuntungan (suara.com, 2020).

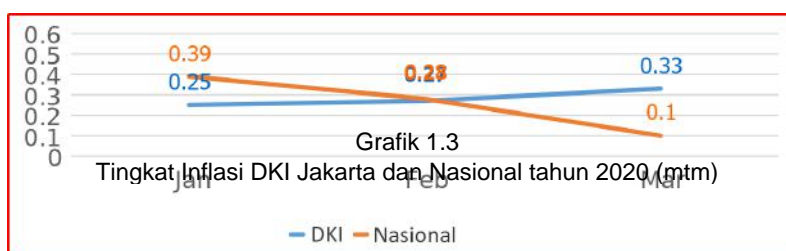
2. Pertumbuhan Ekonomi dari sisi Pengeluaran



Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi triwulan I 2020 utamanya disebabkan oleh melambatnya komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang tumbuh sebesar 4,93% menurun dibandingkan pada triwulan I 2019 yang tumbuh 5,77%. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi dimana masyarakat belajar di rumah dan bekerja dari rumah. Komponen berikutnya yang mengalami perlambatan adalah komponen ekspor yang tumbuh 9,75% menurun dibandingkan pada triwulan I 2019 yang tumbuh 12,19%. Penurunan nilai ekspor Jakarta terjadi pada sektor industri pengolahan, yang dipicu oleh turunnya ekspor komoditi kendaraan dan bagiannya, perhiasan/permata, serta kain perca.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sedikit lebih cepat yaitu 1,64% naik dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar 1,55%. Hal ini disebabkan pada triwulan I 2020 pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di ibu kota seperti pembangunan *underpass*, jalan layang, maupun trotoar masih berjalan sesuai rencana. Komponen impor sebagai faktor pengurang PDRB terakselerasi menjadi 4,93% naik dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar -1,00%, kontributor terbesar adalah impor mesin-mesin/pesawat mekanik.

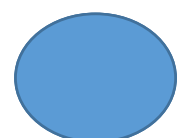
B. Inflasi



Inflasi bulan Maret 2020 di Jakarta mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,33% (mtm) dibandingkan inflasi bulan sebelumnya.

Namun demikian, secara nasional inflasi justru mengalami penurunan. Fenomena *panic buying* akibat pandemi corona memicu inflasi. Sejak diumumkan dua pasien pertama dengan status positif COVID-19 berasal dari Depok dan beraktivitas di Jakarta, warga ibu kota langsung memborong bahan pokok yang menyebabkan kelangkaan barang akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Andil inflasi Jakarta pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020 didominasi oleh

Sumber: Website BPS Provinsi DKI Jakarta dan BPS RI Tahun 2020

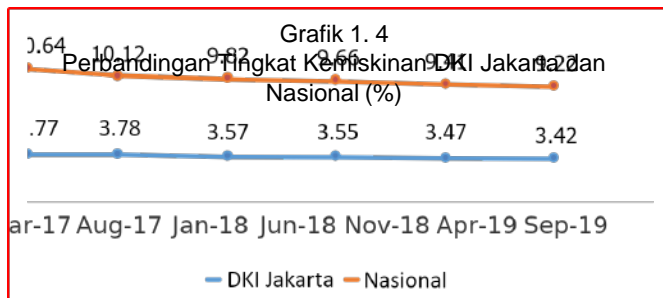




kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di samping itu inflasi di Jakarta didorong dari kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kontribusi kelompok dimaksud terhadap inflasi logis dengan adanya pembatasan aktivitas termasuk kegiatan, maka sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan di rumah.

C. Indikator Kesejahteraan

1. Kemiskinan dan Ketimpangan



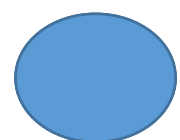
Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2019 mencapai 3,42% atau mencakup sebanyak 360.300 orang, turun 0,15 poin atau setara 13.700 orang bila dibandingkan

September 2018.

Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada periode Maret 2020 ini diperkirakan meningkat dengan terjadinya pandemi COVID-19. Secara nasional penduduk miskin diperkirakan meningkat 3,78 juta orang (money.kompas.com, 2020).

Gini Ratio DKI Jakarta pada bulan September 2019 tercapai sebesar 0,391, naik sebesar 0,001 poin dibandingkan September 2018. Walaupun tergolong ketimpangan rendah (<0,4%) namun secara nasional Jakarta menempati urutan ke-5 dengan *Gini Ratio* tertinggi.

Untuk memulihkan kondisi Perekonomian Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan melalui konferensi video pada 31 Maret 2020 dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat mengenai Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19, (setkab.go.id, 2020). Pertama, meningkatkan jumlah penerima dan besaran PKH. Kedua, meningkatkan jumlah dan besaran Kartu Sembako dan akan diberikan selama 9 bulan. Ketiga, meningkatkan anggaran Kartu Prakerja. Keempat, memberikan diskon tarif listrik selama tiga bulan. Kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar.



2. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020 tercapai 4,93% mengalami penurunan dibanding periode yang sama dalam empat tahun terakhir. Tingkat kesempatan kerja di DKI Jakarta mencapai titik tertingginya sepanjang dekade terakhir. Pada Februari 2020, kesempatan kerja di kota metropolitan ini berhasil melewati angka 95 persen. Pertambahan penciptaan 2.747 lapangan kerja baru menjadi salah satu faktor pendorongnya, yang dalam periode sama tercatat sebanyak 5,17 juta orang



Meski kesempatan kerja meningkat, namun sejumlah persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan. Di antaranya adalah, meningkatnya angka pengangguran di kelompok laki-laki serta pekerja

tidak penuh. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mengumumkan sebanyak 162.416 pekerja di ibu kota dirumahkan dan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya ekonomi nasional karena pandemi virus Corona atau COVID-19 (liputan6.com, 2020).

Untuk mengatasi peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK maupun yang dirumahkan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Semua warga yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar (Prakerja.go.id, 2020). Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat jumlah pendaftar program sudah menembus 8 juta orang sejak gelombang awal dibuka hingga 27 April 2020 (cnnindonesia.com, 2020).

Sumber: Website BPS Provinsi DKI Jakarta dan BPS RI 2017-2020





Tantangan Ekonomi Regional Akibat Pandemi COVID-19

Tantangan ekonomi pemerintah pusat maupun daerah akibat pandemi COVID-19 adalah menurunnya aktivitas perekonomian, yang berdampak pada turunnya konsumsi, investasi, dan bahkan dengan adanya pembatasan travel berdampak pada ekspor dan impor. Konsumsi Rumah Tangga di DKI Jakarta sebagai kontributor utama sisi pengeluaran pada triwulan I tahun 2020 menyumbang 61,16% dari PDRB, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,93% menurun dibandingkan pada triwulan I 2019 yang tumbuh 5,77%. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi dimana masyarakat belajar di rumah dan bekerja dari rumah (BPS DKI Jakarta, 2020).

Pada Maret 2020, ekspor DKI Jakarta sebesar 826,33 juta dollar Amerika, turun 13,08% dibanding bulan sebelumnya, hal ini juga sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mulai masuk Indonesia pada 2 Maret 2020. Ekspor kendaraan dan bagiannya merosot 65,45 juta dollar Amerika. Begitu pula ekspor perhiasan/permata turun 46,58 juta dollar Amerika. Sementara ekspor kain perca yang didominasi oleh masker nilainya turun 20,14 juta dollar Amerika (BPS DKI Jakarta, 2020).

Jumlah pengangguran periode Februari 2020 tercatat sebanyak 268.324 orang dengan data tertinggi pada kelompok pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan di pasar tenaga kerja. Artinya, kompetensi lulusan SMK dan perguruan tinggi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja. Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta dihitung mulai 10 April 2020, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona. Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali (cnnindonesia.com, 2020). Pendaftaran Kartu Prakerja di DKI Jakarta dilakukan secara mandiri melalui situs bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 atau dengan mengirim e-mail ke disnakertrans@jakarta.go.id dengan terlebih dahulu mengunduh formulir pendataan diri di bit.ly/formulirkartuprakerja (liputan6.com, 2020).





II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Sejalan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian regional, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga banyak mewarnai pelaksanaan APBN tahun 2020. Salah satu kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah dalam rangka mengatasi dampak COVID-19 adalah *refocusing* dan realokasi APBN/APBD untuk dioptimalkan dalam mengatasi wabah COVID-19. *Refocusing* dan realokasi APBN/APBD dimaksud sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penangan COVID-19. *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 sebesar Rp3,3 triliun yang dialokasikan kepada Kementerian Kesehatan Rp3,14 triliun, Deputi Bidang Logistik BNPB Rp106,79 miliar, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Rp27,68 miliar, Gugus Tugas Rp12,78 miliar dan TNI Rp82 miliar (nasional.kontan.co.id, 2020).

Namun, seiring perkembangan bencana wabah COVID-19 yang meluas ke seluruh Indonesia maka pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai langkah nyata penanggulangan wabah COVID-19 dan mengatasi dampak sosial ekonomi dalam waktu mendatang.

Secara umum, kebijakan yang tertuang dalam Perppu tersebut adalah kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Pemerintah telah memberikan tiga kebijakan stimulus fiskal untuk penanganan dampak COVID-19. Kebijakan stimulus I ditujukan untuk memperkuat perekonomian domestik yaitu melalui percepatan pencairan belanja modal, belanja bantuan sosial, dan transfer ke daerah dan dana desa, selain itu juga memberikan perluasan kartu sembako,





subsidi bunga perumahan, insentif sektor pariwisata dan kartu prakerja. Kebijakan stimulus II difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor melalui pemberian insentif pajak yang berlaku bulan April s.d. September 2020. Dalam tahap implementasi kebijakan pemerintah memberikan kebijakan stimulus III dengan mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun yang terdiri dari tambahan belanja negara Rp255,1 triliun yang diperuntukkan bagi kesehatan Rp75 triliun, jaring pengaman sosial Rp110 triliun, dukungan industri Rp70,1 triliun dan tambahan pembiayaan Rp150 triliun untuk Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota memiliki peran sangat penting terhadap pengelolaan APBN secara nasional. Hal ini mengingat sebagian besar dana APBN baik pendapatan maupun belanja negara dikelola oleh kementerian dan lembaga yang berlokasi di Jakarta. Postur APBN lingkup Provinsi DKI Jakarta adalah dalam tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1

Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi DKI Jakarta s.d. akhir Triwulan I Tahun 2019 dan 2020
(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA		208.514,27		197.693,70
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI		208.514,27		197.693,70
1. Penerimaan Pajak		177.480,81		166.638,88
2. PNPB		31.033,46		31.054,82
II. HIBAH				
B. BELANJA NEGARA	514.452,89	74.843,16	505.536,44	83.956,60
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	495.015,03	71.584,15	490.296,35	83.519,53
1. Belanja Pegawai	97.846,41	56.174,44	101.421,05	18.866,63
2. Belanja Barang	182.288,51	15.634,64	183.268,63	14.992,52
3. Belanja Modal	101.747,1	1.885,31	100.330,12	2.606,72
4. Belanja Bantuan Sosial	113.133,00	36.901,17	105.276,55	47.053,66
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA				
1. Transfer ke Daerah	19.437,86	3.259,01	15.240,09	437,07
a. Dana Perimbangan	19.380,68	3.230,42	15.177,48	
1) Dana Bagi Hasil	16.224,37	3.229,07	11.947,22	22,93
2) Dana Alokasi Khusus Fisik	9,30	0	26,67	
3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.147,01	1,36	3.203,79	414,14
b. Dana Insentif Daerah	57,18	28,59	62,61	
C. SURPLUS DEFISIT		133.671,11		113.737,10

Catatan: Pagu dan Realisasi Triwulan I 2019-2020 K/L Tidak termasuk BA Bendahara Umum Negara
Sumber: OMSPAN/MEBE 17-04-2020, Simtrada 06-04-2020 (data diolah)

Realisasi penerimaan pemerintah pusat pada triwulan I tahun 2020 menurun sebesar 5,19% dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2019. Realisasi belanja pemerintah pusat untuk K/L pada triwulan I tahun 2020 tercapai sebesar 17% dari pagu, mengalami





kenaikan dibanding realisasi belanja pada triwulan I tahun sebelumnya sebesar 14,46%. Adapun realisasi transfer ke daerah mencapai 2,8% dari pagu, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan I tahun sebelumnya sebesar 16,77%.

A. Pendapatan Negara

Dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019, total pendapatan negara pada triwulan I tahun 2020 turun disebabkan penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar -6,11% yang diakibatkan turunnya PPh sebesar -8%, Bea Cukai -3% dan PPN -2%, sedangkan penerimaan negara bukan pajak sedikit meningkat sebesar 0,07%, yang ditopang oleh adanya kenaikan pendapatan BLU.

1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan pajak pada triwulan I 2020 adalah sebesar Rp166,61 triliun, atau sebesar 68,9% dari penerimaan pajak secara nasional sebesar Rp241,61 triliun, dengan rincian:

a) Pajak Penghasilan (PPh)

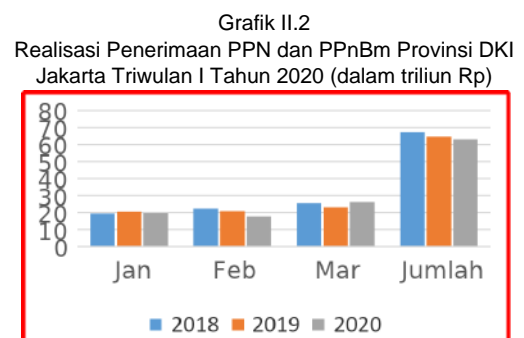


Realisasi penerimaan PPh sebagaimana grafik II.1 pada triwulan I tahun 2020 turun 8% dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2019 mencapai Rp98 triliun atau 66,4% dari realisasi nasional sebesar Rp147,81 triliun. Kontribusi terbesar penerimaan pajak penghasilan berasal dari PPh pasal 25 Badan sebesar Rp25 triliun dan PPh pasal 21 sebesar Rp18 triliun.

Sumber: OMSPAN 06-04-2020

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Realisasi PPN dan PPnBM pada triwulan I tahun 2020 turun 2% dari tahun sebelumnya mencapai Rp63,12 triliun setara 70,3% dari realisasi nasional sebesar Rp89,71 triliun, sebagaimana grafik II.2. Penerimaan PPN dan PPnBM berasal dari aktivitas perdagangan barang/jasa dalam negeri maupun impor, sumbangan terbesar PPN dan PPnBM adalah PPN impor sebesar Rp36

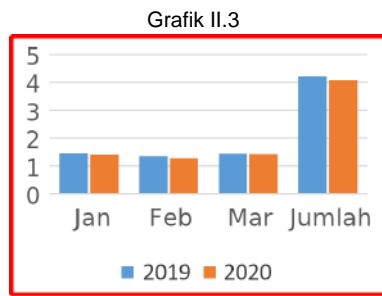


Sumber: OMSPAN 06-04-2020



triliun.

c) Penerimaan Bea dan Cukai

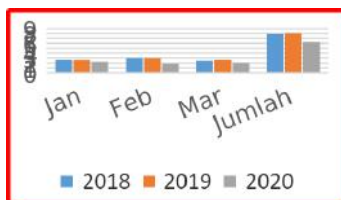


Sumber: OMSPAN 06-04-2020

Realisasi penerimaan bea dan cukai triwulan I tahun 2020 sebesar Rp4,08 triliun, yang mengalami penurunan 3% dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat dari grafik II.3. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 14% dari penerimaan bea dan cukai secara nasional sebesar Rp29,14 triliun, dominasi penerimaan bea dari pendapatan bea masuk sedangkan penerimaan cukai dari pendapatan cukai hasil tembakau.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a) Penerimaan Pendapatan Sumber Daya Alam



Realisasi penerimaan SDA sebagaimana terlihat dalam grafik II.4 sampai dengan triwulan I tahun 2020 turun 23% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,19 triliun, yang setara 17,6% dari realisasi nasional sebesar Rp35,03 triliun. Kontributor terbesar penerimaan SDA dari iruan produksi/royalti pertambangan batubara yang turun.

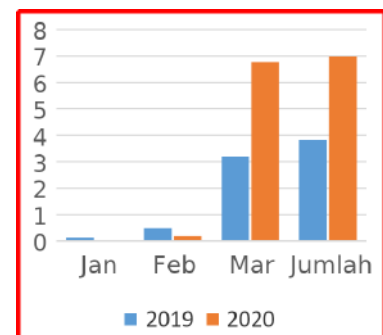
Grafik II.1
Realisasi Penerimaan PPh
Triwulan I Tahun 2020 (dalam triliun Rupiah)

Sumber: OMSPAN 06-04-2020

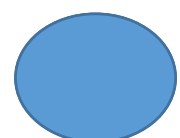
b) Penerimaan BLU

Realisasi penerimaan BLU sebagaimana grafik II.5 sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebesar Rp6,99 triliun mengalami kenaikan 83% dari tahun lalu, yang ditopang karena adanya penerimaan setoran pendapatan dana perkebunan kelapa sawit sebesar Rp3,1 triliun di bulan Maret 2020. Jumlah ini berkontribusi 54,3% dari penerimaan BLU secara nasional sebesar Rp12,86 triliun. Sumbangan terbesar penerimaan berasal dari kegiatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit serta jasa layanan rumah sakit.

Grafik II.5
Realisasi Penerimaan BLU Provinsi
DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2019
(dalam triliun Rp)



Sumber: OMSPAN 06-04-2020



c) Penerimaan PNBP Lainnya

Realisasi penerimaan PNBP Lainnya triwulan I tahun 2019 turun 8% dibanding tahun sebelumnya tercatat Rp17,8 triliun atau setara 73,8% realisasi nasional sebesar Rp24,11 triliun. Realisasi PNBP lainnya tersebut utamanya ditopang oleh pendapatan penjualan hasil tambang batubara, pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio, dan pendapatan premium obligasi negara dalam negeri/rupee serta pendapatan atas penempatan uang negara pada Bank Indonesia.

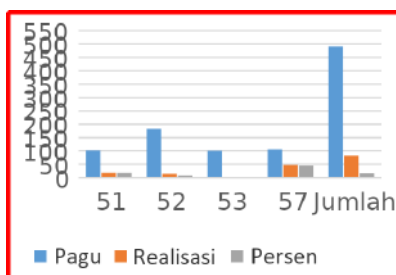
3. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah dibukukan oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, sehingga tidak terdapat penerimaan hibah triwulan I tahun 2020 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat Kementerian/ Lembaga lingkup Provinsi DKI Jakarta sampai dengan triwulan I tahun 2020 adalah 17% tercapai sebesar Rp83,51 triliun, setara 59,8% realisasi nasional sebesar Rp142,96 triliun, sebagaimana grafik II.6.



Realisasi belanja

Grafik II.6
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Provinsi
DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2020
(dalam triliun Rp)

pemerintah pusat pada triwulan I 2020 yang paling tinggi adalah belanja bantuan sosial yang mencapai 44,7%.

Tingginya realisasi belanja bansos berupa pencairan bantuan kepada masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai dan Program Indonesia Pintar serta penanganan dampak wabah COVID-19.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi dana transfer ke daerah sampai triwulan I 2020 Rp437,07 miliar baru mencapai 2,86% dari pagu dan transfer ke daerah atau hanya 0,25% dari realisasi TKDD nasional Rp174,5 triliun. Realisasi tersebut dalam grafik II.7. terdiri dari Dana Bagi

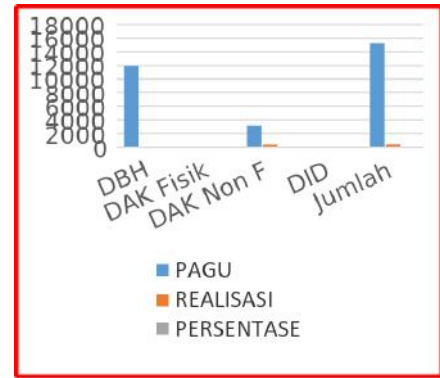
Sumber: MEBE 06-04-2020

Grafik II.7
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Provinsi DKI
Jakarta Triwulan I 2020
(dalam triliun rupiah)





Hasil (DBH), DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi pagu transfer ke daerah pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15,24 triliun relatif kecil, yaitu hanya sebesar 1,84% dari total dana transfer secara nasional yang sebesar Rp826,77 triliun. Hal tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan Provinsi DKI Jakarta terhadap pemerintah pusat kecil.



Sumber: SIMTRADA 06-04-2020

3. Pengelolaan BLU

Sampai dengan triwulan I 2020 jumlah satuan kerja BLU pusat di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 46 satuan kerja. Realisasi belanja BLU tercatat sebesar Rp2,02 triliun atau 10% dari pagu sebesar Rp20,13 triliun. Capaian ini naik 2,8% dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh kenaikan realisasi BLU Kominfo dan BLU Kemenkeu.

4. Manajemen Investasi Pusat

Sampai dengan semester I 2020 investasi pemerintah pusat yang direkonsiliasi oleh Kanwil DJPb bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/BUMD/Koperasi sebanyak enam pinjaman:

Tabel II.2
Outstanding Pinjaman Pemda/BUMD/Koperasi Lingkup Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2020

Sumber: Aplikasi SLIM

Investasi pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMN dalam rangka pengembangan usaha dan restrukturisasi sebagaimana grafik II.8. Terdapat 27 BUMN lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan penerusan pinjaman dengan total 141 perjanjian. Dari 27 BUMN, PT. PLN merupakan debitur terbesar yang dipergunakan dalam rangka pembangunan pembangkit dan jaringan listrik untuk meningkatkan layanan dengan total pinjaman sebesar Rp41,31 triliun atau 57,77% dari total pinjaman.

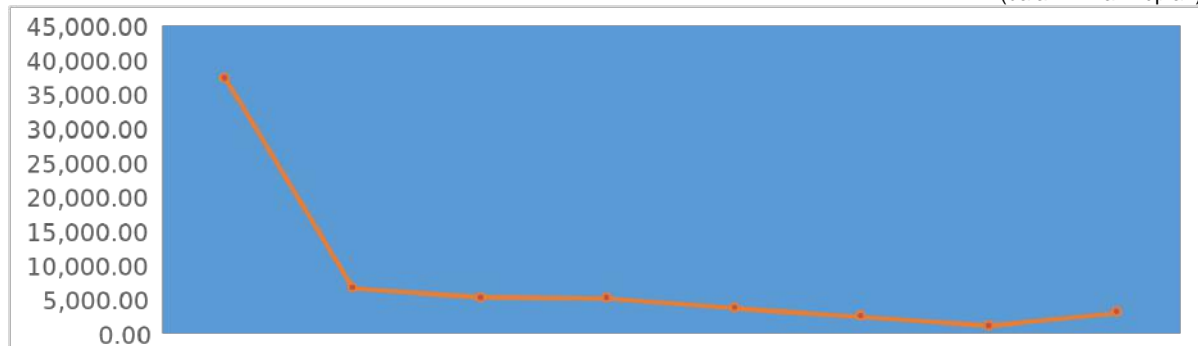




Grafik II.8

Outstanding Pinjaman BUMN Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I Tahun 2020

(dalam miliar Rupiah)



Sumber : KPPN Investasi

Selain itu, terdapat 7 BUMN lainnya dengan pinjaman diatas Rp1 triliun berturut-turut adalah PT PANN, PT.PGN, Pertamina, PT. SMI, PT. Merpati, PT. BPUI, dan PT. Rajawali Nusindo. Investasi pemerintah pusat lainnya dari pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerjasama dengan pihak perbankan dan pemberian pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui lembaga penyalur.

Tabel II.3

Jumlah Debitur dan Realisasi Penyaluran KUR dan UMi Lingkup Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan I Tahun 2020

Jenis Pinjaman	Jumlah Debitur	Realisasi (dalam miliar Rupiah)	Keterangan
KUR	20.427	866,36	Data Realisasi Akad (SIKP)
UMi	108.386	338,69	Data Realisasi Akad (SIKP)

Sumber : Aplikasi SIKP

C. Prognosis Realisasi APBN

Berdasarkan tren realisasi pendapatan APBN dalam triwulan IV tahun 2019, dan realisasi penerimaan triwulan I tahun 2020, realisasi pendapatan sampai dengan triwulan IV tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp1.052,12 triliun. Penerimaan sektor perpajakan masih ditargetkan akan tetap menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan penerimaan. Adapun, berdasarkan tren realisasi belanja sampai dengan triwulan IV tahun 2019 dan juga capaian realisasi pada triwulan I tahun 2020, maka realisasi belanja sampai dengan triwulan IV tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp460,34 triliun, atau 91,06% dari pagu belanja.

Tabel II.4

Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi DKI JAKARTA s.d. Triwulan IV Tahun 2020 (miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2020	Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2020
--------	------	--------------------------------------	---





		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi thd Pagu
Pendapatan Negara	--	197.693,70		1.052.120,00	
Belanja Negara	505.536,44	83.956,60	17	460.341,48	91,06
Surplus/Defisit	--	113.737,10		591.778,52	

Sumber: OMSPAN/MEBE

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 mempunyai target pendapatan daerah sebesar Rp82,19 triliun dan anggaran belanja daerah Rp80,45 triliun, sehingga diproyeksikan surplus senilai Rp1,74 triliun, yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,6% untuk target pendapatan dan 3,34% untuk anggaran belanja daerah, namun untuk pembiayaan minus sebesar Rp1,74 triliun yang akan ditutup dengan surplus.

Tabel 3.1
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2018 (dalam miliar rupiah)

URAIAN	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	74,997.49	11,374.61	82,195.99	10,369.41
Pendapatan Asli Daerah	50,845.08	7,781.10	57,561.16	7,981.42
Pendapatan Pajak Daerah	44,540.00	6,443.16	50,170.00	6,473.08
Retribusi Daerah	710.13	130.13	755.76	198.26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	618.38	-	750.00	40.19
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4,976.57	1,207.81	5,885.41	1,269.89
Pendapatan Transfer	21,366.24	3,593.51	21,680.92	2,387.99
DBHI Pajak/ Bukan Pajak	18,152.76	3,244.02	18,387.83	2,387.99
Dana Alokasi Khusus	3,156.30	292.31	3,230.47	-
Dana Penyesuaian dan Otsus	57.18	57.18	62.62	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2,786.17	-	2,953.91	-
Pendapatan Hibah	2,786.17	-	2,953.91	-
BELANJA	77,857.51	12,752.87	80,454.44	7,988.97
Belanja Pegawai	23,276.72	4,040.86	24,190.77	4,085.15
Belanja Bunga	76.00	18.03	76.00	16.47
Belanja Subsidi	4,797.63	78.41	5,579.19	783.05
Belanja Hibah	2,753.05	0.50	2,575.05	-
Belanja Bantuan Sosial	4,466.44	291.27	4,805.80	-
Belanja Bantuan Keuangan	847.25	-	563.91	-
Belanja Tidak Terduga	269.32	243.88	897.26	-
Belanja Barang dan Jasa	23,976.72	1,864.71	23,685.81	2,886.39
Belanja Modal	17,394.38	6,215.21	18,080.63	217.91
SURPLUS/DEFISIT	(2,860.02)	(1,378.26)	1,741.55	2,380.44
PEMBIAYAAN	7,882.43	(916.81)	(1,741.56)	425.43





Penerimaan Pembiayaan	11,174.81	-	5,760.15	442.24
SiLPA TA yang lalu	2,139.92	-	5,500.00	442.24
Penerimaan Pinjaman Daerah	9,034.89	-	260.15	-
Pengeluaran Pembiayaan	3,292.38	916.81	7,501.71	16.81
Penyertaan Modal (Investasi)	33.65	900.00	6,968.06	-
Pembayaran Pokok Utang	398.62	16.81	33.65	16.81
Pemberian Pinjaman Daerah	2,860.11	-	500.00	-
SILPA		(2,295.07)		2,805.87

Sumber : <https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/> diolah

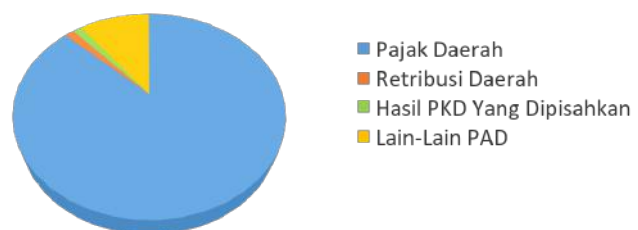
A. Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah tahun 2020 Rp82,19 triliun naik sebesar 9,6% dari tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2020 hanya mencapai 12,61% dari yang dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan dampak virus corona yang mengakibatkan rendahnya realisasi di triwulan pertama dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan dikhawatirkan target realisasi tersebut tidak dapat tercapai sampai akhir tahun. Oleh sebab itu perlu kiranya Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang atau merasionalisasikan target pendapatan pasca merebaknya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

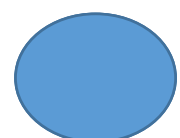
Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Anggaran PAD pada tahun 2020 sebesar Rp57,56 triliun yang mengalami kenaikan 13,22% dari tahun 2019 tersebut mempunyai porsi sebesar 70,03% dari total pendapatan.

Grafik 3.2
Realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta
Triwulan I Tahun 2019/2020
(dalam miliar rupiah)



Sumber : <https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/> diolah

Komposisi PAD terdiri dari empat jenis penerimaan dimana anggaran terbesar adalah pendapatan pajak daerah sebesar Rp50,17 triliun atau 87,16% dari total PAD dan menyumbangkan 61,04% dari total pendapatan Provinsi DKI Jakarta.

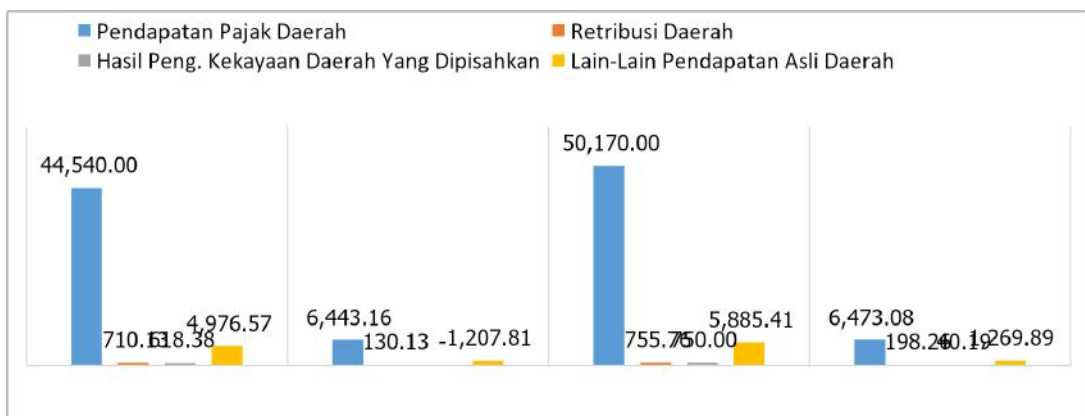




Anggaran pendapatan pajak daerah tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 12,64%.

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 realisasi pendapatan PAD mencapai 13,87% dari yang ditargetkan turun 1,4% dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama hal ini dikarenakan realisasi pendapatan pajak daerah yang mempunyai porsi terbesar mempunyai realisasi sebesar 12,9% dari yang ditargetkan dimana pada tahun sebelumnya mencapai 14,47%. Realisasi PAD tersebut terdiri dari empat komponen, tiga diantaranya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya hanya satu komponen yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mengalami kenaikan 5,36% disebabkan pada tahun sebelumnya belum ada realisasi, seperti terlihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemda Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2019/2020
(dalam miliar rupiah)



Sumber : <https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/> diolah

2. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan

Disamping penerimaan dari PAD pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berasal dana transfer dari pemerintah pusat yang pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp21,68 triliun tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya hanya naik sebesar 1,47%. Pendapatan transfer tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak maupun DBH Bukan Pajak sebesar Rp18,39 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,23 triliun serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp62,62 miliar. Komponen dari pendapatan transfer tersebut rata-rata mengalami kenaikan sebesar satu sampai sepuluh persen dari tahun sebelumnya.





Sampai dengan triwulan I tahun 2020 ini pendapatan transfer mencapai Rp2,39 triliun atau 11,01% menurun dibandingkan tahun 2019 yang dapat mencapai 16,82% pada periode yang sama. Realisasi tersebut hanya didukung oleh satu komponen yakni dana bagi hasil, sementara dua komponen yang lain belum terdapat realisasi.

Rendahnya realisasi tersebut juga disebabkan dampak dari penyebaran virus corona, sehingga Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berasal dari pemerintah pusat belum dapat terpenuhi. Secara nasional TKDD untuk tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp856,94 triliun terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp72 triliun, namun dengan kondisi saat ini Kementerian Keuangan akan melakukan pemotongan TKDD tersebut sekitar Rp94 triliun. Hal tersebut karena penerimaan negara diproyeksikan akan menurun sekitar 10% dari target APBN 2020. (liputan 6, 14 April 2020)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Unsur pendapatan daerah selain dari pajak daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat juga berasal dari lain-lain pendapatan yang sah, dimana pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bersumber dari penerimaan hibah.

Anggaran penerimaan hibah tahun 2020 adalah sebesar Rp2,95 triliun tidak berbeda jauh dengan yang ditargetkan pada tahun sebelumnya yakni naik sebesar 6,11%. Sedangkan untuk realisasinya sampai dengan akhir triwulan I belum terdapat penerimaan, sama halnya pada tahun sebelumnya dalam periode yang sama.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp80,45 triliun naik sebesar 3,32% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 realisasi menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama yakni sebesar Rp7,99 triliun atau 9,93% dari yang dianggarkan, sementara pada tahun 2019 mencapai 16,38%.

Anggaran belanja daerah terdiri dari sembilan jenis belanja, namun terdapat tiga jenis belanja yang mempunyai anggaran tertinggi yakni belanja pegawai mencapai

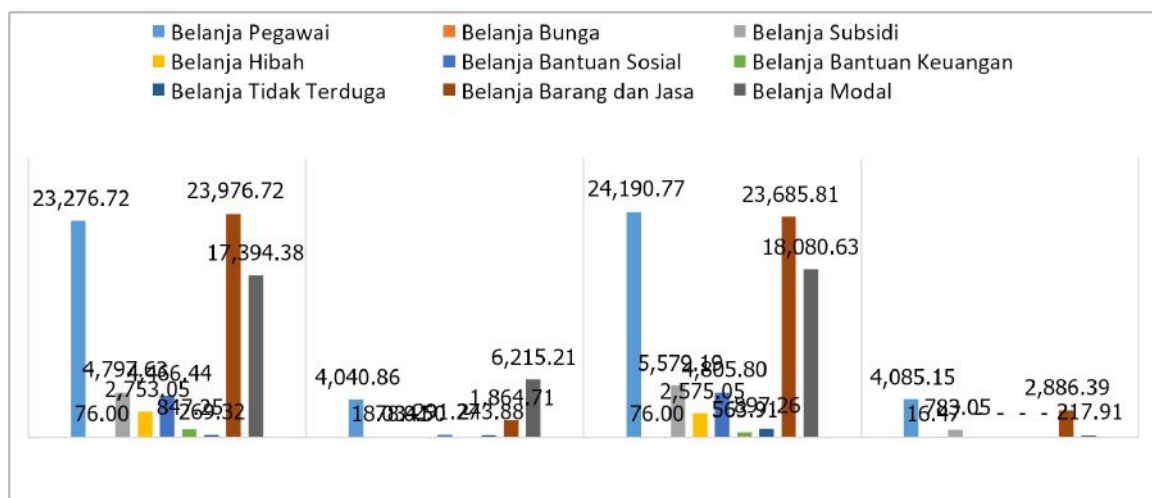


30,06%, belanja barang & jasa sebesar 29,43% serta belanja modal 22,47%. Ketiga jenis belanja tersebut mencapai Rp65,96 triliun atau sebesar 81,97% dari total anggaran belanja daerah.

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2020 realisasi belanja daerah hanya berasal dari lima jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp4,08 triliun atau 16,89%; belanja bunga Rp16,47 miliar atau 21,67%; belanja subsidi Rp783,05 miliar atau 14,04%; belanja barang & jasa sebesar Rp2,89 triliun atau 12,19%; dan belanja modal Rp217,91 miliar atau 1,21% dari pagu masing-masing jenis belanja.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tersebut rata-rata mengalami penurunan sebesar 6,46%. Pada tahun 2019 dalam periode yang sama hampir semua jenis belanja sudah mempunyai realisasi kecuali belanja bantuan keuangan, sementara pada tahun 2020 terdapat empat jenis belanja yang belum mempunyai realisasi yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Total realisasi belanja tahun 2019 tersebut mencapai sebesar Rp12,75 triliun atau sebesar 16,38% dari yang dianggarkan, sementara untuk tahun 2020 hanya mencapai 9,93% seperti terlihat pada grafik 3.3.

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Belanja Daerah
Pemda Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2019/2020
(dalam miliar rupiah)



Sumber : <https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/> diolah





C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Pelaksanaan anggaran daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 akan mendapatkan banyak tantangan dikarenakan dampak perekonomian akibat bencana penyebaran virus corona yang sedang terjadi. Perhitungan prognosis realisasi pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan dua variabel pembanding yaitu triwulan I tahun 2020 dengan triwulan IV tahun 2019.

Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 jika diproyeksikan terhadap realisasi pada triwulan I tahun 2020 untuk pendapatan akan memperoleh realisasi sebesar 50,46% sedangkan belanja daerah sebesar 39,72%. Namun jika diasumsikan tidak terjadi bencana maka realisasi sampai dengan akhir tahun dapat diproyeksikan dari realisasi triwulan IV tahun 2019 dimana realisasi pendapatan mencapai sebesar 84,14% dan belanja daerah mencapai 83,44% seperti pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Prognosis Realisasi APBD Tahun 2020
Provinsi DKI Jakarta (dalam miliar rupiah)

URAIAN	Pagu	Realisasi Triwulan I Tahun 2020		Prognosis Realisasi Triwulan IV			
				Proyeksi dari triwulan I tahun 2020		Proyeksi dari triwulan IV tahun 2019	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan	82,195.99	10.369,41	12,62%	41.477,64	50,46%	69,159.71	84.14%
Belanja	80,454.44	7.988,97	2.82%	31.955,88	39.72%	67,131.18	83.44%
Surplus/ Defisit	1,741.56	2.380,44	-	9.491,76		2,028.53	

Sumber : <https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/> diolah





BOX BAB 3

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Keuangan Daerah

Dampak pandemi COVID-19 di DKI Jakarta semakin meningkat setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tahap pertama dimulai dengan 14 hari dari tanggal 10 – 23 April 2020 dan dilanjutkan tahap kedua sampai dengan 22 Mei 2020. Ketentuan pelaksanaan PSBB tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Hal yang dibatasi antara lain : Sekolah dan tempat kerja diliburkan; Kegiatan keagamaan; Kegiatan di tempat publik atau fasilitas umum; Kegiatan sosial dan budaya dibatasi; Moda transportasi; dan kegiatan lain terkait aspek pertahanan dan keamanan. Tantangan ekonomi Pemerintah Pusat maupun Daerah akibat pandemi COVID-19 adalah menurunnya aktivitas perekonomian, yang berdampak pada turunnya konsumsi dan investasi.

Akibat pembatasan tersebut kondisi aktivitas masyarakat DKI Jakarta berkurang drastis sehingga tingkat konsumsi masyarakat jadi menurun. Bila tingkat konsumsi berkurang, maka pertumbuhan beberapa indikator penopang ekonomi akan mulai menurun karena perekonomian di Jakarta sangat bergantung pada laju konsumsi masyarakat. Hal ini terjadi pada semua sektor terutama bagi sektor-sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik.

Selain itu, dampak langsung PSBB sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pedagang pasar, tukang ojek, dan pedagang kaki lima. Selain itu, dampak langsung PSBB sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pedagang pasar, tukang ojek, dan pedagang kaki lima.





IV. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian mencerminkan realisasi APBN di daerah dan APBD. Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, Pemerintah dapat melihat secara komprehensif uang publik yang mengucur di Provinsi DKI Jakarta. Dinamika realisasi APBN maupun APBD yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dapat tercermin pula dalam Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Triwulan I tahun 2019 - 2020 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Triwulan I tahun 2019	Triwulan I Tahun 2020			
	Konsolidasi	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Negara	218.73	197.69	10.37	208.06	-4.88%
Pendapatan Perpajakan	182.63	166.64	6.67	173.31	-5.10%
PNBP	36.10	31.05	1.31	32.36	-10.36%
Hibah	-	-	-	-	-
Transfer	3.60	-	2.39	2.39	-33.61%
Belanja Negara	144.01	83.97	7.99	91.96	-36.14%
Belanja Pemerintah	140.40	83.52	7.99	91.51	-34.82%
Transfer	3.60	0.44	-	0.44	-87.78%
Surplus/(Defisit)	74.72	113.74	2.38	116.12	55.41%
Pembiayaan	8.80		0.42	0.42	-95.23%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	9.72	-	0.44	0.44	-95.47%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.92	-	0.02	0.02	-97.83%

Sumber : OM-SPAN/MEBE dan <https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/>

Pada triwulan I tahun 2020 realisasi konsolidasian baik dari segi pendapatan negara maupun belanja negara mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama. Realisasi pendapatan negara mengalami penurunan sebesar -4,88% dimana persentase penurunan tertinggi pada PNBP mencapai -10,36%. Sedangkan untuk realisasi belanja negara mengalami penurunan sebesar -36,14% dengan persentase penurunan tertinggi pada belanja transfer mencapai -87,78%.

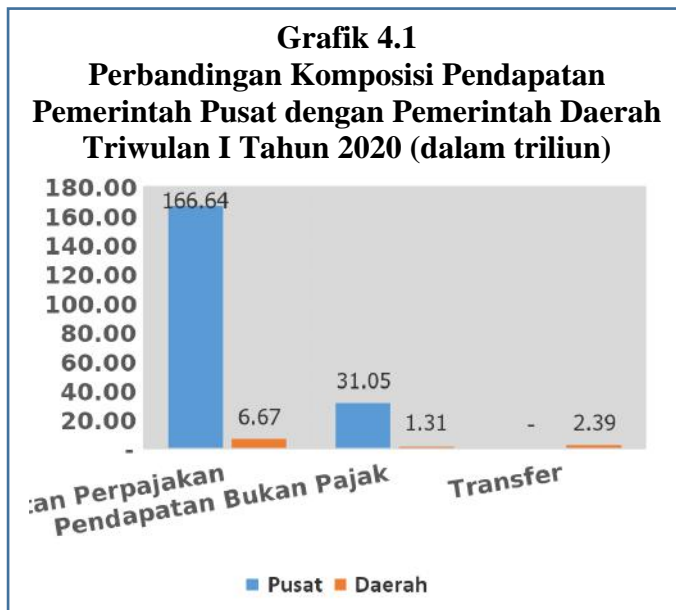
Namun penurunan nilai pendapatan negara dan belanja negara konsolidasian tersebut diatas justru meningkatkan nilai surplus konsolidasian, hal tersebut



dikarenakan persentase penurunan belanja negara jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara sehingga memberikan nilai surplus konsolidasian sebesar Rp116,12 triliun atau sebesar 55,41% dari tahun sebelumnya.

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan



Sumber : OM-SPAN/MEBE dan <https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/>

Dilihat dari proporsinya, pajak pemerintah pusat tercatat sebesar 96,15% dan pajak daerah sebesar 3,85 % dari Pendapatan Pajak Konsolidasian. Sementara PNBP pemerintah pusat tercatat sebesar 95,95% dan PNBP daerah sebesar 4,05% dari PNBP Konsolidasian. Sementara untuk transfer konsolidasian sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebesar 100% merupakan nilai dari transfer daerah.

2. Analisis Perubahan



Grafik 4.2
Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi DKI Jakarta Triwulan I tahun 2018 - 2020 (dalam miliar)



Pendapatan Pajak Konsolidasian menurun sebesar -5,1% dibandingkan triwulan I tahun 2019 dan berkontribusi 83,3% terhadap total pendapatan konsolidasian. Penurunan pajak konsolidasian ditopang jenis penerimaan pajak pemerintah pusat seperti PPh Non Migas dan PPN dalam negeri, terutama menurunnya aktivitas perdagangan internasional karena adanya pandemi virus corona di Cina dan Indonesia.

Jumlah pendapatan bukan pajak konsolidasian menurun sebesar -10,33% dibandingkan triwulan I tahun 2019 dan berkontribusi 15,55% terhadap total pendapatan konsolidasian. Sementara pendapatan transfer konsolidasian pada triwulan I 2020 menurun sebesar -33,61% dari tahun sebelumnya dan memberikan kontribusi sebesar 1,15% terhadap total pendapatan konsolidasian.

Sumber: LKPK (GFS) Provinsi DKI Jakarta (diolah)

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi DKI Jakarta Triwulan I tahun 2019 dan 2020 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Triwulan I tahun 2019		Triwulan I tahun 2020	
	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
Penerimaan Perpajakan	182,63	2,79%	173,31	-5,10%
PNBP	36,10	5,81%	32,36	-10,36%
Total	218,73	8,60%	205,67	-15,46%
PDRB/Pert. Ekonomi	680,57	7,65%	731,78	5,06%

Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2019 dan 31 Maret 2020 (diolah) dan Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dan 2020 (diolah)



Pada triwulan I tahun 2020, PDRB Provinsi DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp731,78 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%. Realisasi pendapatan pajak dan PNBPN konsolidasian sebesar Rp205,67 triliun, menurun sebesar 5,97% dibanding triwulan I tahun 2019. Sejalan dengan penurunan pendapatan pajak dan PNBPN, pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 2,59% dari tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan



Sampai dengan triwulan I tahun 2020 realisasi belanja konsolidasian tertinggi adalah belanja bantuan sosial sebesar 51,66% dari total belanja konsolidasian, dimana realisasi tersebut berasal dari belanja pusat sedangkan belanja daerah belum mempunyai realisasi.

Rata-rata persentase belanja pemerintah pusat terhadap total belanja konsolidasian adalah sebesar 91,23%, dimana persentase tertinggi adalah pada

Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 31 Maret 2019 (diolah)

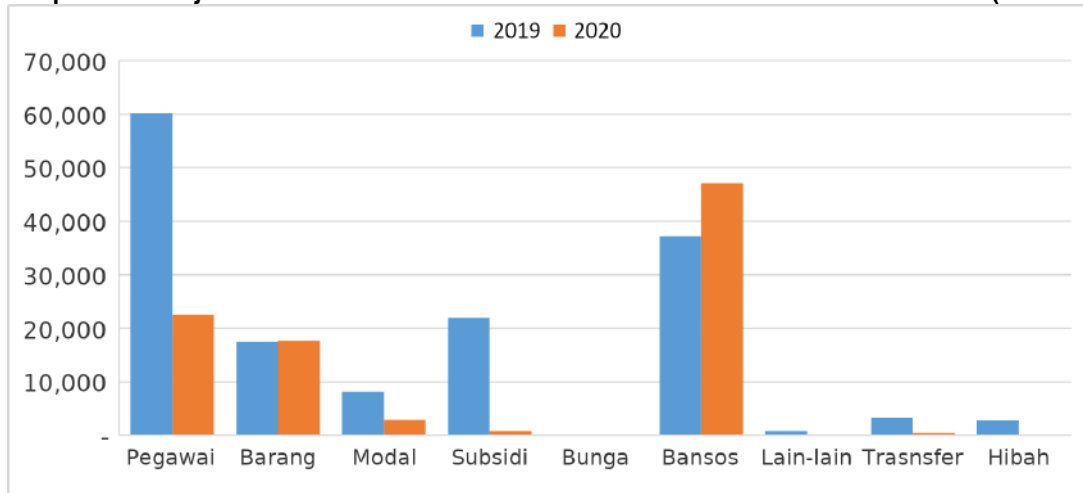
belanja modal dengan porsi sebesar 91,88%

sedangkan belanja modal daerah hanya mempunyai porsi sebesar 8,12%.



2. Analisis Perubahan

Grafik 4.5
Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta Triwulan I tahun 2019 dan 2020 (dalam%)



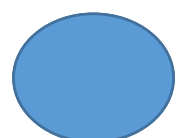
Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 31 Maret 2019 (diolah)

Total belanja pemerintah konsolidasian triwulan I tahun 2020 turun sebesar 36,14% dari tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Pandemi COVID-19 mengakibatkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menunda aktivitas rutin sehingga hampir semua jenis belanja masih mempunyai realisasi yang relatif kecil dalam tiga bulan terakhir kecuali belanja bantuan sosial yang naik sebesar 26,53%. Hal tersebut dikarenakan belanja bantuan sosial merupakan prioritas nasional untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional

Nilai ekspor DKI Jakarta sepanjang bulan Maret 2020 turun moderat sebesar 13,8% dibanding Maret 2019, sementara impor naik cukup tinggi sebesar 31,64%. Meski demikian kinerja ekspor impor Jakarta masih terbilang sehat ditengah pandemi COVID-19 yang melanda Jakarta. Sementara upaya peningkatan efektivitas program perlindungan sosial ditandai dengan peningkatan belanja bantuan sosial sebesar 26,53% dibandingkan triwulan I tahun 2019.

Dalam konteks untuk mewujudkan kesejahteraan, target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RKPD dan KUA PPAS 2020 melalui angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% baru dapat dicapai sebesar 5,06%. IPM Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi 80,76 sedangkan angka kemiskinan masih di angka 3,42%. Dalam ketenagakerjaan, BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan





kerja di DKI Jakarta pada bulan Februari 2020 meningkat menjadi 95,07% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 94,87%. Sementara tingkat pengangguran turun 0,2 poin dari angka 5,13 di tahun 2019 menjadi 4,93 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai hasil investasi maupun upaya pemerintah pusat dan daerah menciptakan lapangan kerja melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Nilai Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Perbandingan nilai pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB menghasilkan nilai kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB sebesar 10.33%, dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial.

2. Nilai kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB

Perbandingan nilai PMTB (aset tetap pada transaksi aset non keuangan neto) dibagi dengan PDRB menghasilkan nilai kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB sebesar 1,64%. Investasi berupa realisasi belanja modal pemerintah pusat pada triwulan I tahun 2020, khususnya pada kegiatan produktif seperti pembelian peralatan dan mesin yang didominasi oleh realisasi belanja modal Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

(Sumber : Berita Resmi Statistik, 5 Mei 2020)





V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN KEUANGAN DKI JAKARTA

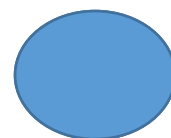
DKI Jakarta yang menjadi provinsi dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak bahkan mencapai hampir 50% dari jumlah positif di Indonesia merasakan dampak yang cukup signifikan bukan hanya pada kesehatan manusia namun juga kesehatan ekonomi.

Jauh sebelum pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mengimbau seluruh warga Jakarta waspada terhadap wabah pneumonia berat yang berawal dari Kota Wuhan, Tiongkok, sejak 31 Desember 2019 melalui siaran pers nomor 1032/SP-HMS/02/2020 tanggal 22 Januari 2020. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan instruksi nomor 16 tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengendalian resiko penularan COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tanggal 2 Maret 2020 melalui siaran pers nomor 1088, Gubernur DKI Jakarta membentuk Tim Tanggap COVID-19 yang kemudian dibubarkan dan diganti dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan Pergub Nomor 328 tahun 2020.

Dampak ekonomi terkait pandemi COVID-19 di DKI Jakarta mulai dirasakan masyarakat DKI Jakarta setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tahap pertama dimulai dengan 14 hari dari tanggal 10 – 23 April 2020 dan dilanjutkan tahap kedua sampai dengan 22 Mei 2020. Ketentuan pelaksanaan PSBB tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PSBB mengakibatkan penurunan bahkan terhentinya aktivitas perekonomian, yang berakibat pada penurunan konsumsi. Diperkirakan selain konsumsi rumah tangga menurun, investasi juga merosot tajam, ekspor pun diperkirakan terkoreksi lebih dalam. Sektor UMKM adalah sektor yang juga terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.





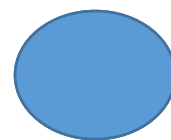
Indikator kesejahteraan yang akan dirilis Badan Pusat Statistik periode triwulan I 2020 diperkirakan akan terdampak meningkat seperti angka pengangguran, kemiskinan dan *Gini Ratio*. Sebanyak 162.416 pekerja di ibu kota telah dirumahkan dan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya ekonomi nasional karena pandemi virus Corona atau COVID-19. Pekerja tersebut berasal dari 18.045 perusahaan. Rinciannya, 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan terkena PHK dan 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran berdampak meningkatnya jumlah kemiskinan dan *Gini Ratio*.

Langkah kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan pandemi COVID-19 adalah dengan menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dan pencegahan penularan COVID-19 hingga akhir Mei mendatang sebesar Rp2 triliun yang sebelumnya sebesar Rp1,032 triliun. Alokasi anggaran tersebut berasal dari penundaan sejumlah Penanaman Modal Daerah (PMD) khususnya anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula-E, dan penundaan pembelian tanah yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sejumlah OPD dalam penanggulangan COVID-19.

Untuk menambah *cash flow* yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19, Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan terkait pencairan dana bagi hasil sebesar Rp 7,5 triliun dengan rincian piutang tahun 2019 sebesar Rp5,1 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp 2,4 triliun.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta mendata tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave) akibat terdampak wabah virus corona (COVID-19). Berdasarkan data Disnakertrans DKI hingga Sabtu (4/4/2020) sore, sudah ada 88.835 buruh dari 11.104 perusahaan yang terdata.

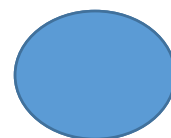
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program bantuan sosial (Bansos) selama diberlakukannya PSBB yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19. Target penerima bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga yang bermukim di DKI Jakarta yang didistribusikan setiap hari, dari tanggal 9 sampai dengan 24 April 2020.





Masyarakat miskin dan rentan miskin di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan bantuan sosial tersebut, meliputi: masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta; memiliki penghasilan kurang dari Rp5 juta/bulan; terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji; tutup usaha/tidak bisa berjualan kembali; dan pendapatan/omset berkurang drastis akibat pandemi COVID-19.

(Siaran Pers Nomor : 1206/SP-HMS/04/2020 tanggal 13 April 2020, diunduh tanggal 19 April 2020)





BOX BAB 5

Respon Fiskal Pemprov DKI Jakarta terhadap Pandemi COVID-19

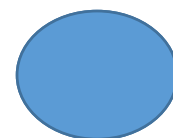
Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan peraturan ditetapkanlah keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Nomor 119/2813/SJ_177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020.

DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling terdampak dengan angka terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi di Indonesia hamper mencapai setengah dari angka nasional yakni sebesar 42,17% data update 26 April 2020. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya penanganan dan pencegahan penularan COVID-19 tersebut lebih awal mendahului ketetapan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yakni yang pertama adalah Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 24 tahun 2020 tentang Input Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang berisi kucuran dana Belanja Tak Terduga sebesar Rp131.060.375.011.

Kemudian menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi DKI selanjutnya Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2020 perubahan dari peraturan sebelumnya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 antara lain berisi tambahan alokasi anggaran BTT sebesar Rp2 triliun atau 194% dari alokasi dana sebelumnya yang sebesar Rp1,032 triliun. Sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ini sebesar Rp3,032 triliun digunakan hingga akhir Mei mendatang. (Bisnisjakarta, 3 April 2020)

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan beserta jajaran telah memberikan layanan kesehatan jiwa (mental) terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19, dimana sampai dengan 23 April 2020, tercatat sebanyak 1.595 klien (OTG, ODP, PDP, maupun keluarganya) yang sudah mendapat layanan.

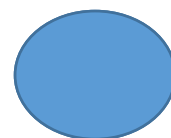
Sementara itu, terkait pelaksanaan bantuan sosial pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejak 9 April 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan sosial untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19. Sampai dengan 24 April 2020 bantuan sosial telah didistribusikan di 29 Kelurahan di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Total paket yang didistribusikan sebanyak 68.551 paket. Target





DAFTAR PUSTAKA

- Website Pemprov DKI Jakarta (2020); <https://www.covid19.go.id/> diunduh 27 April 2020
- Website Pemprov DKI Jakarta (2020); <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan> diunduh 27 April 2020
- Kompas.id (2020); <https://bebas.kompas.id/baca/ekonomi/2020/03/21/indonesia-tak-akan-resesi-meski-ekonomi-jakarta-berhenti-karena-wabah-covid-19/> diunduh 13 April 2020
- Kompas.id (2020); <https://bebas.kompas.id/baca/ekonomi/2020/03/21/indonesia-tak-akan-resesi-meski-ekonomi-jakarta-berhenti-karena-wabah-covid-19/> diunduh 13 April 2020
- Wartaekonomi.co.id (2020); <https://www.wartaekonomi.co.id/read279104/menkeu-pandemi-corona-pukul-konsumsi-rumah-> diunduh 13 April 2020
- Kompas.id (2020); https://money.kompas.com/read/2020/04/14/141348026/dampak-corona-angka-kemiskinan-bisa-meningkat-378-juta-orang?utm_source=Facebook&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Dekstop diunduh 13 April 2020
- Liputan6.com (2020); <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4220444/30137-pekerja-di-jakarta-kena-phk-akibat-wabah-corona#> diunduh tanggal 13 April 2020
- Kompas.com (2020); <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/21/12423721/pembangunan-infrastruktur-di-dki-tetap-berjalan-meski-corona-mewabah> diunduh 29 April 2020
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/04/01/1657/maret-2020> diunduh 29 April 2020
- <https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/>, diunduh 21 April 2020
- <http://dprd-dkijakartaprof.go.id/>, diunduh 24 April 2020
- <https://www.liputan6.com/>, 14 April 2020, diunduh 16 April 2020
- <https://www.liputan6.com/>, 24 Maret 2020, diunduh 19 April 2020.
- Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Nomor 119/2813/SJ_177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020.





- Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 24 tahun 2020 tentang Input Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2020 perubahan dari peraturan sebelumnya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- <http://bisnisjakarta.co.id/>, 3 April 2020, diunduh 24 April 2020
- <https://ppid.jakarta.go.id/> Siaran Pers Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov. DKI Jakarta, Nomor : 1230/SP-HMS/04/2020 tanggal 24 April 2020, diunduh 26 April 2020
- <https://money.kompas.com/read/2019/08/16/144306026/ini-3-strategi-kebijakan-fiskal-indonesia-tahun-2020> diunduh 26 April 2020

